



## Peran Kepemimpinan Peratin Terhadap Pembangunan Pekon Tahun 2024

### *The Role of Peratin's Leadership in the Development of Pekon in 2024*

Veronica Yulia Putri<sup>1</sup>, Nur Islam<sup>2</sup>, Martharia Putri<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

veronicayptr@gmail.com, nurislam67719600@gmail.com, martharia.tanjung@gmail.com

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan Peratin dalam pembangunan Pekon Tapak Siring, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024. Fokus kajian meliputi fungsi Peratin sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan lima indikator Indeks Pembangunan Desa (IPD), yaitu pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peratin telah berupaya menjalankan perannya, implementasi masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Ditemukan pula bahwa komunikasi antara Peratin dan warga masih kurang efektif karena terbatas pada perwakilan pemangku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan penguatan komunikasi publik guna mendorong pembangunan pekon yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** peran; kepemimpinan; peratin; pembangunan; pekon

#### Abstract

*This study aims to examine the leadership role of the village head (Peratin) in the development of Tapak Siring Village (Pekon), Sukau District, West Lampung Regency in 2024. The focus of this research is on the functions of the village head as a motivator, facilitator, and mobilizer in the context of village development. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analytical framework is based on five indicators of the Village Development Index (Indeks Pembangunan Desa/IPD), namely basic services, infrastructure, accessibility, public services, and governance. The results indicate that (1) the village head has made efforts to fulfill these roles; however, their implementation has not been fully optimal due to budget limitations, uneven infrastructure, and limited accessibility to public services, and (2) coordination and communication between the village head and the community remain ineffective, as deliberations involve only hamlet representatives rather than the broader community, alongside insufficient information dissemination and limited community participation in decision-making related to village development. This study concludes that more participatory and strategic leadership is needed to promote sustainable and comprehensive village development.*

**Keywords:** role; leadership; peratin; development ; pekon

## I. PENDAHULUAN

Kepemimpinan Peratin dalam pembangunan Pekon Tapak Siring telah berjalan melalui fungsi motivator, fasilitator, dan mobilisator dengan fokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, saluran irigasi, dan fasilitas

kesehatan. Namun, realisasi pembangunan fisik masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan regulasi. Sementara itu, pembangunan non-fisik, seperti pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial, belum mendapat perhatian dan dukungan anggaran yang memadai, sehingga pelaksanaannya masih bersifat swadaya masyarakat.

Kepemimpinan Peratin dalam pembangunan Pekon Tapak Siring telah berjalan melalui fungsi motivator, fasilitator, dan mobilisator dengan fokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, saluran irigasi, dan fasilitas kesehatan. Namun, realisasi pembangunan fisik masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan regulasi. Sementara itu, pembangunan non-fisik, seperti pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial, belum mendapat perhatian dan dukungan anggaran yang memadai, sehingga pelaksanaannya masih bersifat swadaya masyarakat (Ahady, 2024)

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terus mendorong percepatan pembangunan dengan menekankan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2020). Hal ini krusial mengingat desa merupakan satuan pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang langsung menyentuh kebutuhan dasar mereka.

Di Provinsi Lampung, struktur pemerintahan desa memiliki kekhasan nomenklatur sesuai kearifan lokal. Misalnya, istilah "tiyuh" digunakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, "kampung" di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Tulang Bawang, sementara di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat digunakan istilah "pekon", dengan kepala desa disebut "peratin". Keanekaragaman istilah ini mencerminkan kekayaan budaya dan struktur sosial khas Lampung yang tetap menginduk pada prinsip pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa.

Peratin adalah kepala pekon yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pekon merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mengatur kepentingan berdasarkan adat istiadat. Oleh karena itu, posisi peratin tidak hanya administratif, tetapi juga simbol kepemimpinan lokal yang mengemban fungsi sosial, budaya, dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menegaskan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini menempatkan kepala desa sebagai aktor sentral dalam proses pembangunan di tingkat lokal. Venny dan Putri (2023) juga menyatakan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan karena memiliki otonomi dalam mengelola urusan masyarakat secara langsung. Dengan demikian,

kepemimpinan desa yang akuntabel dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan partisipatif.

Beberapa penelitian memperkuat bahwa efektivitas pembangunan desa bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala desa. Dwirandra dkk. (dalam Azhar & Setiawan, 2024) menyatakan bahwa kepemimpinan partisipatif meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan. Kristalina & Annisa (2019) menekankan pentingnya kemampuan kepala desa dalam membimbing dan menggerakkan masyarakat. Wahyudi & Cahyadi (2022) menyatakan bahwa model kepemimpinan yang efektif berkontribusi pada kesejahteraan warga desa. Fadjar dkk. (2021) menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh peran kepala desa.

Secara konseptual, Sihombing (2022) mendefinisikan peran sebagai aktivitas yang dilakukan secara terorganisir dalam suatu organisasi atau masyarakat. Sementara itu, Napitupulu dkk. (2019) menjelaskan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi dan mengoordinasikan individu agar mencapai tujuan bersama. Dalam perspektif pembangunan, Syamsiah (2014) menegaskan bahwa pembangunan mencakup seluruh sistem sosial dan bertujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Tjokroamidjojo (dalam Safitri & Suriani, 2019) mengidentifikasi tiga fungsi utama kepemimpinan desa: motivator, fasilitator, dan mobilisator. Ketiganya berperan dalam membangun partisipasi, menyediakan sarana, dan menggerakkan warga. Namun, kajian ilmiah terkait peran peratin di Kabupaten Lampung Barat masih terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk memperkaya literatur tentang kepemimpinan lokal berbasis pekon.

Dalam penelitian ini, kerangka analisis yang digunakan mengacu pada lima indikator Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirumuskan oleh Badan Pusat Statistik (2019), yaitu: pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kelima indikator ini mencerminkan dimensi fundamental dalam pembangunan desa yang memungkinkan evaluasi peran kepemimpinan Peratin dilakukan secara komprehensif dan terukur.

Penelitian mengenai kepemimpinan desa telah banyak membahas peran kepala desa dalam pembangunan, baik dari aspek administratif, partisipatif, maupun transformasional (Azhar & Setiawan, 2024; Hilde & Purwatiningsih, 2019). Namun, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada struktur kepemimpinan formal dalam konteks kepala desa di wilayah Jawa atau Sumatera bagian utara dan kurang memberi perhatian pada figur Peratin sebagai pemimpin lokal adat di wilayah Lampung Barat. Selain itu, penelitian yang menyoroti praktik kepemimpinan berbasis nilai budaya lokal dalam pembangunan desa juga masih terbatas dan belum mengungkap secara mendalam strategi serta tantangan yang dihadapi dalam menjembatani nilai tradisional dan kebijakan pemerintahan modern.

Beberapa studi cenderung menekankan peran teknis pemimpin dalam pembangunan fisik desa, tanpa menyoroti dimensi sosial dan relasi antar-aktor

lokal yang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat (Sumiati et al., 2023; Umarsari, 2025). Dalam konteks ini, kajian mengenai Peratin Tapak Siring menjadi penting karena menunjukkan model kepemimpinan berbasis musyawarah dan kekeluargaan yang khas, namun belum banyak dijadikan fokus kajian akademik. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dalam literatur dengan menelaah bagaimana Peratin sebagai figur lokal memimpin pembangunan pekon secara holistik mencakup strategi, bentuk partisipasi, dan capaian sosial dalam konteks nilai lokal Lampung Barat yang belum banyak tereksplorasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kepemimpinan Peratin PAW dalam pembangunan Pekon Tapak Siring tahun 2024. Fokus kajian diarahkan pada tiga fungsi utama kepemimpinan, yaitu motivator, fasilitator, dan mobilisator, yang dianalisis menggunakan lima indikator Indeks Pembangunan Desa (IPD) menurut Badan Pusat Statistik, yaitu: pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam peran kepemimpinan Peratin dalam pembangunan Pekon Tapak Siring, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara kontekstual dan holistik fenomena sosial yang sedang dikaji, khususnya dalam dinamika kepemimpinan lokal dan pembangunan desa.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pekon Tapak Siring, yang menjadi representasi wilayah dengan permasalahan pembangunan yang kompleks, baik pada aspek fisik maupun non-fisik. Ditemukannya hambatan seperti infrastruktur yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat, dan komunikasi yang belum efektif antara pemerintah pekon dan warga menjadi latar belakang pemilihan lokasi. Penelitian dilakukan selama Januari hingga Maret 2025, dengan tahapan observasi, pengumpulan data, dan verifikasi informasi secara bertahap.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan utama yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon: Peratin M. Sanimbar, Sekretaris Pekon Hengky Syaputra, Kaur Perencanaan Ahmad Liswan, serta dua warga yaitu Dedy dan Zubir. Teknik wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, memungkinkan fleksibilitas dalam menggali narasi, persepsi, serta pengalaman mereka terkait peran kepemimpinan dalam pembangunan.
2. Data sekunder, diperoleh dari dokumentasi resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pekon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Tahun Anggaran 2024, laporan kegiatan

pembangunan pekon, serta dokumentasi visual berupa foto-foto pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Teknik pengumpulan data mengacu pada prosedur menurut Sugiyono (2020), meliputi:

1. Wawancara, untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana peratin menjalankan fungsi motivator, fasilitator, dan mobilisator.
2. Observasi non-partisipatif, dilakukan untuk mencermati langsung dinamika interaksi sosial, kondisi fisik wilayah, dan pelaksanaan program pembangunan pekon tanpa keterlibatan langsung peneliti.
3. Dokumentasi, dimanfaatkan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data dari wawancara dan observasi, terutama berkaitan dengan kebijakan, perencanaan, dan realisasi pembangunan.
4. Analisis data dilakukan dengan pendekatan model interaktif menurut Sugiyono (2016), yang mencakup tiga tahapan utama:
5. Reduksi data, yakni proses menyaring, memilih, dan memfokuskan data berdasarkan relevansi terhadap peran kepemimpinan Peratin.
6. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi tematik yang disusun berdasarkan fungsi kepemimpinan dan lima indikator IPD.
7. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan secara berulang dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi temuan.

Untuk meningkatkan validitas, dilakukan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan dan reliabilitas data yang diperoleh. Seluruh proses analisis dilakukan secara simultan selama dan setelah tahap pengumpulan data berlangsung di lapangan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekon Tapak Siring terletak di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat memiliki sejarah yang kaya nilai budaya dan adat istiadat. Nama "Tapak Siring" berasal dari kata "Tapak" yang berarti telapak dan "Siring" yang berarti irigasi, mengacu pada sebuah batu besar yang memiliki bekas telapak kaki manusia dan jejak ayam hutan, yang menjadi simbol identitas lokal pekon ini.

Pekon Tapak Siring didirikan pada tahun 1956 dan merupakan pekon induk yang kemudian mengalami pemekaran wilayah administratif. Pekon ini merupakan yang pertama dimekarkan di Kecamatan Sukau pada tahun 1975 sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif. Dari hasil pemekaran tersebut, lahirlah Pekon Bumi Jaya pada tahun 2003 dan Pekon Teba Pering Jaya pada tahun 2010. Secara geografis, Pekon Tapak Siring memiliki luas wilayah sekitar 239.600 hektar dan terletak pada ketinggian  $\pm 1.500$  meter di atas permukaan laut. Wilayah ini didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat, yang berjumlah sekitar 1.300 jiwa

dan tersebar di beberapa pemangku. Kondisi ini menjadi latar penting dalam memahami konteks sosial dan geografis yang memengaruhi peran kepemimpinan Peratin dalam proses pembangunan pekon.

Sejarah dan kondisi khas Pekon Tapak Siring tersebut menjadi dasar untuk memahami bagaimana peratin menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam pembangunan fisik dan non-fisik pekon, sebagaimana akan dibahas pada bagian selanjutnya.

### **Peran Peratin sebagai Motivator**

Dalam konteks kepemimpinan desa, fungsi motivator menjadi aspek esensial dalam menggerakkan partisipasi warga terhadap pembangunan. Seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengarah kebijakan, tetapi juga bertindak sebagai sumber inspirasi dan penggerak semangat kolektif masyarakat. Peratin Pekon Tapak Siring, M. Sanimbar, menjalankan peran ini dengan pendekatan langsung dan keteladanan. Ia menyatakan, "Saya selalu mengajak masyarakat dengan pendekatan langsung dan memberikan contoh nyata agar mereka lebih antusias." Pernyataan ini mencerminkan upaya Peratin untuk menciptakan hubungan sosial yang hangat dan komunikatif sebagai strategi membangkitkan semangat gotong royong warga.

Namun, efektivitas peran motivator ini belum sepenuhnya optimal. Partisipasi warga, khususnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, masih bersifat terbatas. Hal ini disebabkan oleh struktur musyawarah yang cenderung elitis, hanya melibatkan perwakilan pemangku, sehingga aspirasi masyarakat tidak terdistribusi secara merata. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendekatan motivasional yang digunakan masih belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Dalam teori kepemimpinan partisipatif yang dikemukakan oleh Dwirandra dkk. (dalam Azhar & Setiawan, 2024), keterlibatan aktif warga merupakan indikator keberhasilan fungsi motivator dalam konteks kepemimpinan lokal.

Gaya kepemimpinan Peratin yang komunikatif dan fleksibel mencerminkan model kepemimpinan desa yang disoroti oleh Zola et al. (2024), di mana keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin menyeimbangkan pendekatan regulatif dan dialogis.

Lebih jauh, kendala ini mencerminkan lemahnya strategi komunikasi interpersonal yang inklusif. Kurangnya ruang dialog terbuka di luar forum formal menyebabkan komunikasi hanya berlangsung satu arah, di mana pemerintah menyampaikan informasi tanpa menciptakan ruang diskusi timbal balik. Padahal, menurut Kristalina & Annisa (2019), pemimpin desa harus mampu membimbing masyarakat dengan pendekatan dialogis agar mereka merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap pembangunan desa.

Dalam hal ini, peran motivator yang dijalankan Peratin Tapak Siring sudah menunjukkan arah positif, namun belum menyentuh akar permasalahan partisipasi warga yang rendah. Pendapat Indriyani & Lilis (2019) menekankan bahwa kepala desa harus mampu membangkitkan kesadaran warga dengan

pendekatan yang membumi dan empatik. Dengan demikian, peran motivator tidak hanya diukur dari ajakan atau imbauan, tetapi dari sejauh mana warga terlibat aktif dalam proses pembangunan.

Strategi ke depan yang perlu dikembangkan adalah pendekatan berbasis dusun yang menempatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai agen penyuluh partisipasi. Selain itu, penyediaan media komunikasi seperti papan informasi dusun atau forum diskusi informal dapat menjadi jembatan antara pemerintah pekon dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat kepemimpinan inklusif yang tidak hanya mengandalkan struktur formal, tetapi juga jejaring sosial lokal.

### **Peran Peratin sebagai Fasilitator**

Dalam struktur pemerintahan pekon, peran Peratin sebagai fasilitator merupakan kunci dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Fungsi ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumber daya, serta pemberian kemudahan administratif yang mendorong terwujudnya perubahan sosial dan fisik di tingkat lokal. Di Pekon Tapak Siring, peran fasilitator dijalankan melalui pelaksanaan sejumlah program seperti pembangunan MCK di Way Sukau, saluran irigasi di Pemangku Kunyayan Lama, dan penyuluhan kesehatan di Posyandu. Program-program ini mencerminkan bentuk konkret fasilitasi pemerintah pekon terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Namun demikian, efektivitas peran ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama keterbatasan anggaran dan regulasi yang menghambat realisasi program secara menyeluruh. Ahmad Liswan, Kaur Perencanaan Pekon, mengakui bahwa usulan masyarakat memang menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan, tetapi pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kecukupan dana dan ketentuan teknis yang berlaku. "Kami menyusun rencana berdasarkan usulan warga dan memastikan program sesuai aturan dan anggaran," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses fasilitasi tidak dapat dilepaskan dari struktur kebijakan dan kemampuan fiskal pekon.

Dalam perspektif teori kepemimpinan fasilitatif, pemimpin dituntut untuk mampu mengelola sumber daya secara efektif dan berorientasi pada pencapaian kebutuhan masyarakat secara kolektif (Sineke dkk., 2017). Dengan kata lain, peran fasilitator tidak hanya terbatas pada penyediaan fisik infrastruktur, tetapi juga mencakup kemampuan merancang program yang tepat sasaran serta menjembatani komunikasi antara masyarakat dan sumber daya eksternal, termasuk pihak pemerintah kabupaten atau mitra pembangunan lainnya.

Sumiati et al. (2023) menekankan bahwa partisipasi warga akan tumbuh bila pemimpin memberi ruang untuk dialog dan mendengar aspirasi, sebagaimana dilakukan Peratin Tapak Siring dalam berbagai forum warga yang mendorong keterlibatan nyata.

Keterbatasan peran ini tampak jelas ketika beberapa program pembangunan terpaksa ditunda karena prioritas kebutuhan lain atau tidak

mencukupi dari sisi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan yang berbasis aspirasi warga belum ditunjang dengan mekanisme pengelolaan dana yang fleksibel dan strategis. Akibatnya, beberapa kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasi dalam musyawarah belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Safrida (2024) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa bergantung pada visi kepala desa dalam menggali potensi lokal, sebagaimana Peratin Tapak Siring berhasil merancang program berbasis kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam hal ini, peran Peratin sebagai fasilitator dapat dikatakan telah berjalan namun belum maksimal. Keterbatasan struktural seperti anggaran dan regulasi menjadi hambatan signifikan. Maka diperlukan strategi penguatan kapasitas manajemen fiskal pekon, termasuk pelatihan bagi aparatur pekon mengenai perencanaan pembangunan berbasis prioritas, serta inisiatif kolaboratif dengan instansi lain. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas peran fasilitator, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pekon.

### **Peran Peratin sebagai Mobilisator**

Fungsi mobilisator dalam kepemimpinan desa menekankan pada kemampuan seorang kepala pekon untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat agar aktif dalam pembangunan. Pemimpin yang efektif tidak hanya menyusun program, tetapi juga membangun keterlibatan warga sebagai subjek pembangunan. Peratin Pekon Tapak Siring berupaya menjalankan fungsi ini melalui kegiatan musyawarah, gotong royong, dan program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang dirancang bersama warga.

Namun dalam pelaksanaannya, proses mobilisasi ini menghadapi hambatan struktural dan administratif. Zubir, salah satu warga, menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat seringkali mengalami keterlambatan dalam realisasinya karena keterbatasan anggaran dan panjangnya proses administrasi. "Usulan warga sering membutuhkan waktu lama untuk direalisasikan," ungkapnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara semangat partisipasi yang telah dibangun dengan kemampuan pemerintah pekon dalam menindaklanjuti secara cepat dan akurat.

Masalah ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem umpan balik antara pemerintah pekon dan masyarakat. Meskipun forum musyawarah telah dijalankan secara rutin, masih terjadi kesenjangan dalam komunikasi dua arah. Beberapa keputusan pembangunan tidak dapat ditindaklanjuti secara langsung, menyebabkan menurunnya kepercayaan warga terhadap efektivitas proses musyawarah. Dalam kerangka teoritik, Mahayana (2013) menekankan pentingnya kehadiran pemimpin yang mampu membangun mekanisme mobilisasi yang responsif dan akuntabel agar masyarakat tidak hanya dilibatkan secara formal, tetapi juga secara substantif.

Sadapu et al. (2023) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang memperhatikan kesejahteraan psikologis bawahan mampu meningkatkan etos kerja perangkat desa, yang juga tercermin pada loyalitas perangkat pekon terhadap Peratin Tapak Siring.

Peran mobilisator juga memerlukan kemampuan teknis dan sosial untuk menciptakan ruang bersama antara pemerintah pekon dan masyarakat. Kegiatan gotong royong yang difasilitasi oleh Peratin mencerminkan upaya nyata dalam membangun keterlibatan warga. Namun, jika tidak dibarengi dengan sistem penindaklanjutan aspirasi yang cepat, peran ini dapat mengalami stagnasi dan kehilangan esensinya.

Untuk menguatkan fungsi ini, perlu dikembangkan sistem umpan balik yang terstruktur, seperti forum evaluasi pembangunan dusun, serta penyusunan rencana aksi jangka pendek dan menengah berbasis hasil musyawarah warga. Selain itu, transparansi terhadap tahapan pelaksanaan dan penundaan program harus dijadikan prinsip utama agar warga memahami proses dan tetap terlibat secara aktif.

Berdasarkan teori Wayan (2013), pemimpin desa yang efektif adalah mereka yang mampu membangun kesadaran kolektif dan menggerakkan potensi warga secara berkelanjutan. Dalam konteks Pekon Tapak Siring, Peratin telah berupaya menjalankan fungsi ini, namun belum mampu menyelaraskan semangat partisipasi dengan respons birokrasi yang memadai. Maka, strategi komunikasi publik dan tata kelola aspirasi yang transparan perlu diperkuat agar fungsi mobilisator benar-benar berdampak pada keberhasilan pembangunan pekon.

## **Indeks Pembangunan Desa (IPD)**

### **Layanan Dasar**

Layanan dasar merupakan salah satu indikator utama dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang mencerminkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara langsung. Dalam konteks Pekon Tapak Siring, indikator ini mencakup fasilitas kesehatan dan pendidikan yang menjadi kebutuhan mendasar warga. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan layanan dasar belum optimal dan masih menghadapi sejumlah keterbatasan.

Di bidang kesehatan, ketersediaan fasilitas masih terbatas pada Posyandu dan ambulans pekon. Untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat harus bepergian ke puskesmas atau rumah sakit di luar wilayah pekon. Dedy, salah satu warga, menegaskan bahwa fasilitas lokal belum memadai untuk penanganan medis yang lebih serius. "Saat ini, fasilitas kesehatan yang tersedia hanya Posyandu dan ambulans pekon," ujarnya. Kondisi ini menjadi indikator lemahnya kemampuan pekon dalam menyediakan layanan dasar yang layak secara mandiri.

Kepemimpinan Peratin yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah sejalan dengan temuan Nooriskar dan Sujoko (2025), yang

menyebut efektivitas kepemimpinan lokal sangat ditentukan oleh kemampuan menciptakan sinergi antara aparaturnya dan masyarakat.

Sementara itu, sektor pendidikan juga menghadapi tantangan serupa. Meski sudah terdapat sekolah dasar di wilayah pekon, keterbatasan sarana penunjang serta kurangnya tenaga pengajar menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini berisiko memengaruhi akses pendidikan anak-anak dan memperbesar kesenjangan antarwilayah, terutama pada dusun yang lebih terpencil.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa pemerintah pekon belum sepenuhnya berhasil menjamin pemerataan akses layanan dasar bagi seluruh warga. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya alokasi dana desa yang dialokasikan untuk sektor non-fisik, serta belum adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pekon dan sektor kesehatan atau pendidikan dari tingkat kabupaten.

Dalam perspektif kebijakan pembangunan, Syamsiah (2014) menyatakan bahwa pembangunan ideal harus mencakup seluruh sistem sosial masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, peran Peratin dalam memenuhi indikator layanan dasar seharusnya tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan akses dan kualitas layanan sosial dasar.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif melalui koordinasi lintas sektor, baik dengan dinas kesehatan maupun dinas pendidikan setempat. Selain itu, pengembangan program pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, seperti pelatihan kader Posyandu dan optimalisasi penggunaan ambulans pekon, dapat menjadi solusi jangka pendek untuk memperbaiki akses layanan medis. Di bidang pendidikan, pemerintah pekon dapat menjalin kerja sama dengan komunitas pendidikan atau organisasi sosial untuk mendukung fasilitas belajar.

## **Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan fondasi penting dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan layanan publik masyarakat desa. Dalam konteks Pekon Tapak Siring, infrastruktur yang memadai berperan krusial dalam mendukung mobilitas penduduk, akses pendidikan, distribusi hasil pertanian, dan keterhubungan antarwilayah. Namun demikian, kondisi infrastruktur di pekon ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan pembangunan.

Kerusakan pada jalan utama menjadi permasalahan utama yang dirasakan oleh masyarakat. Jalan penghubung antardusun, seperti akses menuju Dusun Kejang Tiyuh dan wilayah Sumber Mulyo, mengalami kerusakan cukup parah dan belum seluruhnya mendapat perhatian dari pemerintah pekon. Hengky Syaputra, Sekretaris Pekon, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan jalan ke Kejang Tiyuh telah disusun, namun realisasinya tertunda karena keterbatasan anggaran dan adanya kebutuhan mendesak lain yang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Zubir, warga setempat, yang menyatakan, “Masih ada beberapa jalan yang perlu diperbaiki, terutama jalan utama Pekon Tapak Siring yang mulai rusak. Akses menuju Sumber Mulyo dan Bumi Rejo juga masih belum terlalu baik dan memerlukan peningkatan.” Keluhan ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk penanganan infrastruktur secara lebih merata dan berkelanjutan.

Selain jalan, persoalan penerangan juga menjadi perhatian penting. Beberapa dusun masih belum memiliki penerangan jalan yang memadai, sehingga aktivitas malam hari menjadi terbatas dan menimbulkan kekhawatiran akan keamanan. Ketergantungan terhadap penerangan dari rumah warga bukanlah solusi jangka panjang dan memperkuat ketimpangan akses infrastruktur antarwilayah dalam pekon.

Keterbatasan fiskal menjadi penyebab utama stagnasi pembangunan infrastruktur. Meskipun perencanaan sudah dilakukan secara partisipatif, realisasi di lapangan tidak selalu berjalan linier akibat prioritas anggaran yang harus dipilah-pilah dengan cermat. Dalam konteks ini, kepemimpinan peratin sebagai fasilitator belum mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan strategi pemanfaatan sumber daya secara efisien.

Sesuai dengan teori pembangunan partisipatif, perencanaan infrastruktur desa seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga dimensi sosial dan keberlanjutan (Fadjar dkk., 2021). Hal ini menuntut kemampuan pemerintah pekon dalam menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta membuka akses pendanaan alternatif, seperti program padat karya atau kemitraan dengan swasta lokal.

## **Aksesibilitas**

Aksesibilitas menjadi indikator penting dalam pembangunan desa karena berkaitan langsung dengan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas dasar dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Dalam konteks Pekon Tapak Siring, aksesibilitas belum merata dan masih menjadi kendala utama, terutama di wilayah dusun yang letaknya terpencil dan sulit dijangkau, khususnya saat musim hujan.

Ketiadaan transportasi umum di wilayah pekon mengakibatkan masyarakat harus bergantung pada kendaraan pribadi atau berjalan kaki, yang menyulitkan kelompok rentan seperti pelajar, ibu hamil, dan lansia. Dedy, salah satu warga, mengungkapkan bahwa, “Akses ke dusun-dusun seperti Bumi Rejo dan Sumber Mulyo memang masih agak sulit, apalagi saat hujan. Transportasi umum belum tersedia, jadi sebagian besar warga memang memakai kendaraan pribadi.” Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat semangat mobilitas dari masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan layanan transportasi menjadi penghambat utama dalam aktivitas harian.

Minimnya akses transportasi tidak hanya memengaruhi pergerakan individu, tetapi juga memperlambat distribusi barang, hasil pertanian, serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini memperlebar kesenjangan

pelayanan antardusun dan memperkuat ketimpangan pembangunan dalam lingkup internal pekon. Ketika sebagian warga memiliki akses cepat dan mudah, sementara yang lain harus menempuh perjalanan panjang dan sulit, maka capaian pembangunan tidak bisa dikatakan inklusif.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, aksesibilitas tidak hanya dinilai dari keberadaan infrastruktur jalan, tetapi juga dari fungsionalitasnya dalam menjangkau pelayanan dan mendorong interkoneksi sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, Peratin belum sepenuhnya mampu menghadirkan solusi atas hambatan aksesibilitas tersebut, baik melalui perencanaan rute transportasi desa maupun pengadaan moda transportasi dasar seperti angkutan desa berbasis komunitas.

Ketidakhadiran inisiatif konkret terkait penyediaan sarana mobilitas publik menandakan bahwa isu aksesibilitas belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pekon. Padahal, strategi sederhana seperti pengadaan kendaraan operasional bersama untuk dusun terpencil atau perbaikan bertahap jalan dusun dapat secara langsung meningkatkan keterjangkauan warga terhadap fasilitas utama.

Karena itu, pembangunan aksesibilitas di Pekon Tapak Siring harus diarahkan pada pendekatan desentralistik, di mana setiap pemangku diberikan porsi perencanaan berdasarkan kebutuhan lokalnya. Langkah ini dapat didukung oleh sistem pelaporan aspirasi berbasis dusun dan pembentukan forum koordinasi antarwakil pemangku.

## **Layanan Publik**

Pelayanan publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan responsif. Dalam konteks Pekon Tapak Siring, pelayanan publik terutama meliputi administrasi kependudukan, surat menyurat, dan layanan pekon lainnya. Namun, dalam praktiknya, pelayanan publik di pekon ini masih menghadapi sejumlah hambatan operasional yang mengurangi efisiensi dan kepuasan warga.

Salah satu permasalahan utama adalah ketidakteraturan kehadiran aparatur pekon, khususnya sekretaris, yang bertugas menjalankan fungsi administratif. Hal ini menyebabkan proses pengurusan dokumen sering tertunda. Zubir, warga setempat, menyampaikan, "Proses pengurusan surat-menyurat di pekon terkadang membutuhkan waktu lebih karena sekretaris tidak selalu di kantor. Jadi warga perlu datang kembali di waktu yang berbeda." Keterangan ini mencerminkan adanya ketergantungan terhadap individu tertentu dalam proses layanan, serta belum adanya sistem pelayanan yang sistematis dan terjadwal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik belum berjalan secara optimal, baik dari segi kecepatan, kehadiran petugas, maupun kualitas interaksi antara warga dan pemerintah pekon. Jika dibiarkan, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta memperbesar jarak sosial antara aparat dan warga.

Pelayanan publik yang ideal seharusnya bersifat efisien, terbuka, dan adaptif terhadap kebutuhan warga. Dalam kerangka pelayanan berbasis masyarakat, pelayanan publik desa seharusnya memiliki standar operasional yang jelas, waktu layanan yang pasti, dan mekanisme pengaduan yang terbuka. Ketiadaan sistem informasi yang mendukung, baik digital maupun manual—menjadi salah satu penyebab lemahnya pelayanan di pekon ini.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan desa yang baik, pelayanan publik merupakan indikator legitimasi dan kredibilitas pemerintah lokal. Menurut Wahyudi & Cahyadi (2022), pelayanan yang responsif menjadi ukuran sejauh mana pemerintah desa dapat menjawab kebutuhan warganya secara langsung dan nyata. Dalam hal ini, fungsi Peratin sebagai pengelola organisasi pemerintahan desa belum sepenuhnya diarahkan untuk membentuk sistem pelayanan yang berkelanjutan.

Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun jadwal pelayanan pekon yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, baik melalui papan informasi maupun media sosial lokal. Selain itu, perlu dipertimbangkan penggunaan sistem administrasi digital sederhana untuk mendokumentasikan proses pengurusan surat-surat dan mengurangi ketergantungan pada kehadiran individu tertentu.

### **Penyelenggaraan Pemerintahan**

Penyelenggaraan pemerintahan pekon yang baik menuntut prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan pembangunan. Di Pekon Tapak Siring, mekanisme pemerintahan telah dijalankan melalui musyawarah pekon secara rutin, namun kualitas partisipasi masyarakat dalam proses tersebut masih terbatas secara substantif.

Mekanisme musyawarah cenderung hanya melibatkan perwakilan dari masing-masing dusun, sehingga masyarakat umum tidak banyak memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi atau memahami proses perumusan kebijakan. Dedy, salah satu warga, menyampaikan, “Meski musyawarah sering dilakukan, masih ada beberapa keputusan yang kurang melibatkan masyarakat secara luas. Terkadang, warga hanya diberi tahu setelah keputusan dibuat.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa musyawarah belum sepenuhnya bersifat deliberatif dan masih didominasi pendekatan representatif sempit.

Lebih lanjut, dalam konteks pembangunan non-fisik seperti kegiatan sosial dan keagamaan, partisipasi warga berjalan secara swadaya, tanpa dukungan anggaran dari pemerintah pekon. Masyarakat mengelola kegiatan seperti pengajian dan perayaan hari besar Islam secara mandiri, sedangkan pemerintah pekon hanya menyediakan fasilitas tanpa kontribusi dalam pendanaan. Dedy menambahkan, “Ada kegiatan seperti pengajian dan perayaan Maulid Nabi, tapi pendanaannya sebagian besar dari iuran masyarakat, bukan dari dana pekon.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintahan pekon belum optimal dalam mendorong tata kelola yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan

masyarakat. Padahal, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menekankan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan dalam rangka memperkuat kohesi sosial dan kultural.

Ketidakterlibatan masyarakat secara menyeluruh serta kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan sosial mengindikasikan lemahnya implementasi prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. Dalam perspektif Azhar & Setiawan (2024), kepemimpinan desa yang baik tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga membuka ruang dialog dan memberikan dukungan nyata bagi inisiatif warga.

Untuk memperbaiki hal ini, perlu dilakukan transformasi dalam tata kelola musyawarah pekon. Musyawarah seharusnya tidak berhenti pada pelibatan perwakilan formal, tetapi harus mencakup mekanisme forum terbuka yang memungkinkan kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, dan warga miskin berpartisipasi secara langsung. Di sisi lain, penganggaran kegiatan non-fisik perlu dimasukkan dalam rencana kerja pekon agar kegiatan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab komunitas, tetapi juga bagian dari prioritas pembangunan desa.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Peratin dalam pembangunan Pekon Tapak Siring tahun 2024 telah dijalankan melalui fungsi motivator, fasilitator, dan mobilisator, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Peran sebagai motivator telah dilakukan melalui pendekatan langsung dan keteladanan, tetapi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih terbatas pada kelompok tertentu. Sebagai fasilitator, Peratin telah mengupayakan pembangunan fisik dan sosial, namun keterbatasan anggaran dan sumber daya menghambat pemerataan pelaksanaan program. Pada fungsi mobilisator, semangat gotong royong telah dibangun melalui musyawarah dan kegiatan bersama, tetapi belum diimbangi dengan sistem umpan balik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Lima indikator Indeks Pembangunan Desa juga mencerminkan sejumlah tantangan. Layanan dasar belum terpenuhi secara merata, khususnya dalam aspek kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur mengalami keterlambatan realisasi akibat keterbatasan dana. Aksesibilitas wilayah masih terganggu oleh ketiadaan transportasi umum dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Pelayanan publik belum efisien karena bergantung pada kehadiran perangkat pekon dan belum didukung oleh sistem administrasi yang terjadwal. Penyelenggaraan pemerintahan juga belum inklusif karena forum musyawarah masih bersifat representatif dan kegiatan sosial warga belum mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pekon. Disarankan agar Peratin dan pemerintah pekon mengembangkan sistem komunikasi yang lebih inklusif, seperti forum musyawarah terbuka dan media informasi digital atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh warga. Selain itu, pendekatan berbasis dusun dan peran aktif tokoh masyarakat serta pemuda sebagai agen penyuluh partisipasi perlu

diperkuat. Dari sisi pembangunan, pengelolaan anggaran harus diperbaiki dengan melibatkan masyarakat dalam prioritas perencanaan, serta menjajaki kemitraan dengan pihak luar untuk mendukung realisasi program non-fisik dan fisik secara lebih merata dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahady, Y. A., Chatra, E., & Asrinaldi. (2025). Dinamika komunikasi dan kesiapan masyarakat menggunakan aplikasi layanan kependudukan 'Dukcapil Ceria Mobile' Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 15–20.
- Azhar, A., & Setiawan, I. (2024). Kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(1), 29–42. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks pembangunan desa 2018. Retrieved December 27, 2024, from <https://www.bps.go.id>
- Dewantara, A. S. (2025). Komodifikasi kemiskinan pada konten bagi-bagi di akun TikTok @WillieSalim. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 97–101.
- Fadjar, T. S., Paisal, M. R., Rohmatullah, M., Fadillah, N. A. N., & Ihsani, P. S. N. (2021). Peran kepemimpinan perangkat pemerintah desa dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 82–95.
- Hilde, M. K., & Purwatiningsih, A. (2019). Pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Studi di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 93–99.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). Gus Halim akan optimalisasi percepatan pembangunan desa. Retrieved December 22, 2024, from <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/5039/gus-halim-akan-optimalisasi-percepatan-pembangunan-desa>
- Mahayana, W. (2013). Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 400–414.
- Napitupulu, R., Putra, D. H., & Shalahuddin. (2019). *Dasar-dasar ilmu kepemimpinan: Teori dan aplikasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nooriskar (2023). Analisis Peran Fasilitator dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 15(1), 45-59.
- Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Peratin dan Perangkat Pekon.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan atau Penggabungan Pekon.

- Putri, S. A., Pohan, S., & Nasution, C. R. (2025). Pengaruh product review Somethinc pada TikTok terhadap brand awareness di Kota Medan. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 74–77.
- Safrida, S., Jamaluddin, Y., Fitriani, F., & Warjio, W. (2023). Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 10(2), 123-135.
- Sihombing, L. M. (2022). Peranan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat Desa Lae Pinang [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Medan Area.
- Sineke, A., Gosal, R., & Lopian, M. (2017). Kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran kepemimpinan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44–54.
- Syahrany, V., & Rahmaini, P. (2023). Pengembangan BUMDes syariah dalam membangun ekonomi berkeadilan di desa. *Demokrasi*, 3(2).
- Syamsiah. (2014). *Dimensi-dimensi pembangunan: Perspektif sistem sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Umbar Sari, D. (2025). Internalisasi nilai kearifan lokal untuk mendukung kebijakan penurunan stunting di Desa Tinukari Kabupaten Kolaka Utara. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 300–303.
- Wahyudi, A., & Cahyadi, S. (2022). Model kepemimpinan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan*, 15(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **Wawancara/ Interviews**

- Sanimbar, M. (2025). Tapak Siring, 17 Maret, 2025.
- Syaputra, Hengky. (2025). Tapak Siring, 3 Maret, 2025.
- Liswan, Ahmad. (2025). Tapak Siring, 6 Maret, 2025.
- Zubir. (2025). Tapak Siring, 15 Maret, 2025.
- Dedy. (2025). Tapak Siring, 19 Maret, 2025.